

"Untuk itulah pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sampai Rp744,75 triliun untuk penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari total anggaran itu, sebanyak Rp187 triliun dimanfaatkan untuk merealisasikan perlindungan atau jaring pengaman sosial".

Tajuk

PON XX, Atensi Negara dan Harga Diri Papua

Hari ini, Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke-XVI di Papua akan resmi dibuka. Sore kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membuka ajang olahraga terakbar di Indonesia ini pun telah tiba di Jayapura.

Seperti halnya di tempat lain, Jokowi selalu kental dengan aktivitas nonprotokol. Saat perjalanan dari Bandara Sentani ke hotel di Jayapura, mobil Jokowi tiba-tiba berhenti. Jokowi menemui warga secara spontan. Dua noken atau tas rajut khas Papua pun dibelinya dari seorang pedagang bernama Paulina Adi. Entah mimpi apa Ibu Paulina ini. Yang jelas, selain barang jualan yang dibeli dengan harga tak biasa, tentu dia tak akan pernah melupakan kejadian sore kemarin sepanjang hidupnya. Lebih bahagia lagi, sang presiden langsung memaki noken tersebut di depannya.

Kelegaan dan kebahagiaan tentu tak hanya dirasakan Paulina semata. PON ke-XX yang digelar di tanah Papua menjadikan masyarakat setempat begitu riang sekaligus terhormat. Bagi sebagian warga Papua ataupun masyarakat Indonesia umumnya, menjadikan Papua sebagai tuan rumah event olahraga nasional ini awalnya tentu seolah khayalan semata.

Mereka tak menyangka Papua dipilih. Munculnya pandangan itu tak berlebihan. Fasilitas olahraga yang minim, sarana dan infrastruktur yang kurang, hingga sumber daya yang terbatas adalah fakta di Papua selamanya. Belum lagi, wilayah Papua yang diujung timur Indonesia rasanya kurang layak untuk menjadi lokasi PON.

Namun berbagai keterbatasan yang ada di Papua ternyata bukanlah menjadi penghalang. Pemerintah justru berbulat tekad kompetisi olahraga level nasional ini harus tetap digelar di Papua. Bahkan, sederet keterbatasan itu justru dijadikan pengungkit (*leverage*) untuk membangun Papua menjadi lebih baik.

Komitmen tinggi pemerintah inilah yang menjadikan PON ke-XX tak sekadar menjadi event terakbar yang pernah dirasakan masyarakat setempat, namun juga sejarah besar perjalanan Papua. Atensi besar yang diikuti dengan pendirian sederet sarana olahraga (*venue*) dan fasilitas ini pun melengkapi komitmen pemerintah Jokowi yang tak henti membangun berbagai infrastruktur di Papua selama ini.

Kendati tak diliputi keriuhan, diakui atau tidak, telah banyak program pemerintahan Jokowi yang memberikan atensi besar bagi kemajuan dan kemakmuran Papua. Terakhir, pemerintah dan DPR pun telah satu suara untuk memberikan perpanjangan dana Otsus Papua hingga 2041 mendatang. Melalui revisi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, juga disepakati besaran dinaikkan menjadi 2,25% dari awalnya 2%.

Meski belum ideal, namun di balik ini tampak ada komitmen besar pemerintah untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Papua secepatnya. Konsekuensinya, pembangunan demi pembangunan digencarkan demi pemerataan keadilan tersebut. Keadilan ini juga nyata terlihat ketika pemerintah memutuskan lokasi PON Papua terbagi hingga di empat wilayah, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke. Ini tak pernah terjadi di PON-PON sebelumnya. Di tiap wilayah ini, selain akhirnya dibangun *venue-venue* anyar, juga dilengkapi sarana pendukung seperti wisma atlet yang ke depan sangat bermanfaat khususnya dalam pengembangan olahraga bagi daerah setempat.

Gelaran PON yang resmi dibuka Jokowi hari ini dari Stadion Lukas Enembe, Kota Jayapura pun sejatinya adalah serpihan komitmen besar pemerintah itu. Langkah ini tentu belum final. Dibutuhkan kesungguhan sekaligus rasa tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya.

Dengan kata itu, PON jelas sejatinya adalah kehormatan besar bagi masyarakat Papua. Dari event inilah, sesungguhnya menjadi potret atas harga diri yang saanya dijunjung tinggi, hingga menjadi setara dengan warga lain di berbagai belahan bumi Indonesia. □



BAMBANG SOESATYO

Ketua MPR RI, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unpad, Dosen Universitas Terbuka

Mendorong Pemulihan Daerah dengan Endapan Dana Pemda

Kecewa dan marah pada fakta endapan dana pemerintah daerah bernilai ratusan triliun rupiah memang tidak menyelesaikan masalah. Namun, suara kekecewaan itu hendaknya memotivasi semua pemerintah daerah untuk segera lebih giat bekerja dan memanfaatkan serta memproduktifkan dana yang mengendap itu untuk menggerakkan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Pandemi Covid-19 telah menghadirkan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan. Dampak buruk itu dirasakan semua orang, baik mereka yang kaya maupun mereka yang berkekurangan. Dampaknya terhadap aspek perekonomian, baik dalam skala negara, daerah, maupun dampaknya terhadap jatah keluarga Indonesia, nyata dan dirasakan langsung selama hampir dua tahun belakangan ini.

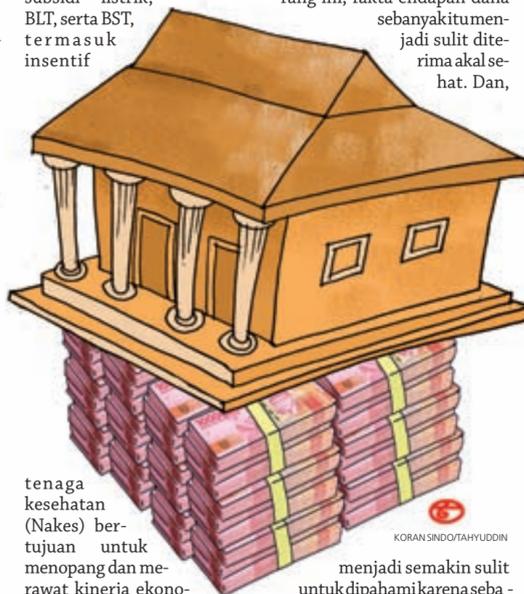
Untuk mereduksi penderitaan serta ketidaknyamanan sebagian besar masyarakat, pemerintah telah merealisasikan sejumlah program jaring pengaman sosial. Ada program kartu prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial tunai (BST), bansos sembako, kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), hingga subsidi internet bagi pelajar. Sebelum pandemi, program jaring pengaman sosial hanya ditargetkan bagi 20% penduduk yang dikategorikan miskin.

Namun, karena dampak buruk akibat pandemi melebar, cakupan atau warga penerima manfaat dari jaring pengaman sosial ditingkatkan hingga mencapai 50% dari total keluarga di Indonesia. Untuk itulah pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sampai Rp744,75 triliun untuk penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari total anggaran itu, sebanyak Rp187 triliun dimanfaatkan untuk merealisasikan perlindungan atau jaring pengaman sosial. Dana penanganan dampak pandemi Covid-19 dan jaring pengaman

sosial itu langsung ditransfer ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) serta semua pemerintah daerah.

Bersama dengan realisasi anggaran PEN yang menasar pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) serta korporasi, alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial seperti program kartu prakerja, subsidi listrik, BLT, serta BST, termasuk insentif

skenario merawat konsumsi dan produksi itu tidak berjalan dengan baik. Sebagian besar masyarakat terhenyak ketika menyimak berita tentang endapan dana pemerintah daerah di perbankan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Ketika dihadapkan pada keterpurukan ekonomi akibat krisis kesehatan sekarang ini, fakta endapan dana sebanyak itu menjadi sulit diterima akal sehat. Dan,



tenaga kesehatan (Nakes) bertujuan untuk menopang dan merawat kinerja ekonomi, utamanya pada aspek permintaan-penawaran atau konsumsi dan produksi.

Konsumsi masyarakat atau rumah tangga menjadi faktor paling signifikan yang memengaruhi dinamika dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya rendahnya konsumsi dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Karenaitu, program seperti BLT, BST, kartu prakerja, plus dukungan kepada UMKM dan korporasi bermakna strategis, yakni menggerakkan permintaan dan produksi. Ketika mesin pabrik mulai produktif lagi, komunitas pekerjanya kembali bekerja. Sebagaimana telah dipahami bersama, salah satu dampak paling nyata dari krisis kesehatan sekarang ini adalah ambruknya kinerja atau produktivitas mesin-mesin perekonomian.

Sangat disayangkan karena

menjadi semakin sulit untuk dipahami karena sebagian dari dana ratusan triliun rupiah itu dialokasikan untuk perlindungan sosial, insentif nakes serta penopang keberlangsungan UMKM di masa pandemi.

Endapan dana Pemda di perbankan bukan kasus baru, karena sudah sering dipersoalkan pada tahun-tahun terdahulu. Namun, ketika endapan dana itu masih terjadi sepanjang hampir dua tahun durasi pandemi, fakta ini menjadi penanda rendahnya sensitivitas aparatur pemerintah pada penderitaan dan ketidaknyamanan masyarakat akibat dampak buruk krisis kesehatan sekarang ini. Kalau pemanfaatan semua dana itu produktif di masa pandemi, dampak positifnya pasti bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Hingga 31 Agustus 2021, total anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun ka-

bupaten/kota, yang mengendap di bank mencapai Rp178,55 triliun. Artinya, ada potensi belanja pemerintah daerah yang begitu besar tetapi belum direalisasikan. Kalau potensi belanja sebesar itu bisa segera direalisasikan, dampaknya terhadap pemulihan ekonomi daerah cukup signifikan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk segera mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinamika perekonomian di masa pandemi sangat bergantung pada belanja pemerintah. Penyerapan anggaran yang cepat dan tepat waktu ikut memengaruhi volume peredaran uang di kabupaten/kota. Dampak positifnya sudah barang tentu ikut dinikmati masyarakat karena bergerak mesin-mesin perekonomian di daerah bersangkutan.

Dalam konteks ini, setiap Pemda disarankan untuk lebih menunjukkan kepedulian pada realisasi anggaran daerah untuk bantuan sosial dan insentif usaha bagi warga terdampak Covid-19. Hal ini penting dan perlu digarisbawahi oleh Pemda, karena realisasi dua mata anggaran itu belum menggembirakan. Ada anggaran daerah Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Pada Juli 2021, misalnya, realisasi anggaran perlindungan sosial baru mencapai Rp2,3 triliun atau 19,2% dari pagu. Dan, realisasi anggaran pemberdayaan ekonomi baru Rp2,4 triliun atau 17,8% dari pagu.

Masyarakat tentu sangat kecewa dan marah dengan fakta seperti ini. Namun, berdebat dan saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah utamanya, yakni mendorong pemulihan ekonomi daerah. Kendati mungkin tidak tepat waktu, belum terlambat bagi semua Pemda untuk bekerja lebih giat lagi. Hampir Rp200 triliun dana Pemda yang tersimpan di bank itu harus dibuat produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga di daerah bersangkutan. □

Hingga 31 Agustus 2021, total anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang mengendap di bank mencapai Rp178,55 triliun. Artinya, ada potensi belanja pemerintah daerah yang begitu besar tetapi belum direalisasikan

Pancasila Kukuh, Indonesia Tangguh



WILDANI HEFNI

Dosen Pascasarjana dan Direktur Rumah Moderasi Beragama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bangsa Indonesia memperingati dua hal penting yang berkaitan dengan Pancasila. Pertama, hari lahir Pancasila setiap 1 Juni. Kedua, hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Untuk tahun ini, peringatan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 mengusung tema 'Indonesia Tangguh berlandaskan Pancasila'. Tanggal 1 Oktober menjadi penguhan Pancasila sebagai ideologi negara, yang dalam sejarahnya, di-lari peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Dalam konsideran Keputusan Presiden (Keppres) No 153 tahun 1967 tentang hari Kesaktian Pancasila, disebutkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran dan kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Kesaktian Pancasila terefleksikan sebagai usaha untuk membentengi riak-riak upaya penghancuran Pancasila, sebagaimana usaha gerakan G30S/PKI yang berhasil digagalkan.

Saat ini, peringatan hari Kesaktian Pancasila sejatinya tidak hanya direfleksikan sebagai peringatan atas peristiwa G30S/PKI, tetapi harus diperluas sebagai momentum untuk memperkuat dan membentengi Pancasila dari segala gang-

guan. Segala usaha yang merongrong Pancasila harus dilawan dan dibasmi hingga akar-akarnya. Kesaktian Pancasila harus dibarengi dengan kesepakatan dan komitmen bahwa Pancasila telah final dan menjadi satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan bangsa sekaligus memben-tuk karakter dan kepribadian bangsa.

Dalam konteks ideologi, Pancasila menjadi cara pandang, cara berpikir, serta paradigma yang menjadi dasar dalam pelbagai pengambilan kebijakan negara. Pancasila menjadi penyanga yang kokoh terhadap keberlangsungan Republik ini. Riak-riak yang berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila tak akan pernah berhasil. Falsafah Pancasila terus mengakar dan menguat dengan nilai humanismenya dalam setiap napas kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila senantiasa aktual, relevan, dan fungsional sebagai landasan kehidupan di tengah realitas multikultural. Itulah kemudian yang dimaknai sebagai kesaktian Pancasila.

Riak Disharmoni

Diakui bersama, pertentangan antara keislaman dan keindonesiaan muncul kembali dalam fragmentasi sosial, setidaknya dalam kurun 10 tahun belakangan ini. Gerakan yang bersifat militan muncul dengan suara-suara lantang mengaburkan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bahkan, lahir "oknum" pemanggul keagamaan yang

menganggap Pancasila sebagai buatan orang kafir dan juga menyebut pemerintah sebagai *thaghut*.

Tentu, realitas demikian dapat mengganggu harmoni kebangsaan dan mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlahan pilar-pilar bangsa, seperti Pancasila, di-konstruksikan sebagai ideologi buatan orang kafir yang tidak sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim. Tidak hanya itu, Pancasila dibenturkan dengan agama.

Riak-riak disharmoni yang pada mulanya bersifat parsial itu pada akhirnya akan melahirkan gerakan besar yang dapat merongrong tali kebangsaan. Perlahan, pilar-pilar penyangga kesatuan Republik ini akan mengalami pengikisan. Karena itu, diperlukan suara-suara lantang dalam narasi bersama tentang keindonesiaan, kebhinekaan, yang bersatu pada dalam pemahaman tunggal bahwa agama dan Pancasila tidak bertentangan.

Indonesia Tangguh

Hari Kesaktian Pancasila saat ini harus dimaknai sebagai titik pijak untuk menguatkan dan mengokohkan tali persatuan dan kesatuan bangsa.

Perjuangan yang telah dilalui oleh para pendiri bangsa menjadi tugas semua masyarakat Indonesia untuk menjaga dan mengawalinya. Pancasila harus ditempatkan dalam tiga temali sekaligus, yaitu sebagai jiwa bangsa (*folkgeist*), cita negara, dan cita hukum (*staats idee and rechts idee*). Pancasila harus berdiri tegak, kukuh, sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Presiden pertama, Soekarno, mendengungkan bahwa setiap perjuangan mesti dimulai dengan *nationallewell* (keinginan nasional), baru kemudian *nationallegeist* (spirit nasional),

baru kemudian *nationalle daad* (tindakan nasional). Nasionalisme menjadi titik pangkal pemikiran Bung Karno, yakni persatuan Indonesia sebagai bangsa untuk melawan pelbagai gangguan. Jiwa nasionalisme menjadi tumpuan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dalam menjaga kepentingan bersama.

Maka, dalam setiap cucuran keringat dan tumpahan darah yang telah dilalui oleh para *founding fathers* Republik ini harus dibayar dengan spirit patriotisme demi bangsa dan negara. Nasionalisme dan patriotisme menjadi kekuatan yang harus dikukuhkan dalam melawan bandit-bandit perongrong pilar-pilar kebangsaan. Pada konteks inilah, ketangguhan Republik ini sedang diuji. Kesaktian Pancasila pun mengamalah bersama. Pelbagai tantangan yang ada harus dijawab dan dilalui bersama. Ketangguhan itu harus muncul dalam setiap individu, minimal dengan cara berperan aktif dalam mengambil bagian menolok paham yang dapat melahirkan kecacauan dan mengancam tali persaudaraan. Penguatan wawas-



Nasionalisme dan patriotisme menjadi kekuatan yang harus dikukuhkan dalam melawan bandit-bandit perongrong pilar-pilar kebangsaan